



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

LAPORAN HASIL EVALUASI

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik



INDEKS SPBE TAHUN 2021

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI
BARAT

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa bahwa kegiatan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2021 telah dilaksanakan dengan baik dan lancar. Pelaksanaan kegiatan evaluasi SPBE bertujuan untuk mengukur capaian kemajuan penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, meningkatkan kualitas penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Harapan kami, hasil evaluasi SPBE tahun 2021 dapat digunakan sebagai pedoman oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan SPBE yang terpadu sehingga dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas, terintegrasi, berkesinambungan, dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bagi aparatur sipil negara instansi pusat dan pemerintah daerah, serta bermanfaat bagi pelaku usaha dan masyarakat luas.

Kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang baik antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan semua pemangku kepentingan termasuk Kementerian Lembaga anggota Tim Koordinasi SPBE Nasional, Tim Asesor Eksternal Perguruan Tinggi, Instansi Pusat, dan Pemerintah Daerah.

Jakarta, 29 Desember 2021

Deputi Bidang Kelembagaan
dan Tata Laksana,



Rini Widyantini

EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2021

Ringkasan Eksekutif

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkelanjutan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Pelaksanaan Evaluasi SPBE dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali untuk dapat memastikan pertumbuhan penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Evaluasi SPBE menghasilkan indeks yang diperoleh secara inkremental, yakni akan terus dilakukan pemutakhiran dari proses peningkatan hasil penilaian dan populasi dalam pelaksanaannya, sehingga memastikan progres kemajuan penerapan SPBE.

Pada tahun 2021, pelaksanaan Evaluasi SPBE telah dilaksanakan dengan menggunakan instrumen yang telah disesuaikan, dari yang sebelumnya 37 indikator menjadi 47 indikator, dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Penyesuaian atas instrumen dilakukan untuk memastikan peningkatan kualitas SPBE dapat tercapai sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dengan diterapkannya instrumen baru ini tentunya terdapat penyesuaian dalam penilaian yang berdampak pada penurunan nilai indeks SPBE di hampir seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah terutama pada indikator-indikator baru yang dinilai pada tahun ini. Namun hal ini ditargetkan untuk memenuhi cakupan yang lebih komprehensif, dimana hasil penilaian tahun ini merepresentasikan indeks penerapan SPBE dengan kualitas yang lebih optimal.

Hasil pelaksanaan Evaluasi SPBE yang dilakukan pada tahun 2021 ini akan menjadi *baseline* kondisi penerapan dengan kesesuaian kriteria dan kondisi yang harus dipenuhi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Untuk itu diharapkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SPBE setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat digunakan dalam menentukan strategi tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah di masa mendatang dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat dan terwujudnya digitalisasi pemerintah dalam kerangka reformasi birokrasi nasional.

Dasar Hukum

- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 962 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Metodologi Evaluasi SPBE

Penerapan SPBE dinilai dengan metode tingkat kematangan SPBE yang merupakan kerangka kerja untuk mengukur derajat kematangan penerapan SPBE yang ditinjau dari kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Tingkat kematangan SPBE terdiri atas 5 (lima) level, dimana masing-masing level menunjukkan karakteristik kematangan tertentu pada kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE.

Penilaian penerapan SPBE didasarkan pada informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui kegiatan penilaian mandiri, penilaian dokumen, dan penilaian interviu melalui proses verifikasi, klarifikasi, dan validasi dokumen pendukung.

Tingkat Kematangan Penerapan SPBE

Tingkat Kematangan Pada Kapabilitas Proses

1. Rintisan

- Pengaturan dalam bentuk konsep yang belum ditetapkan dan Proses tata kelola dilaksanakan secara *ad-hoc*.

2. Terkelola

- Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi sebagian kebutuhan di Instansi Pemerintah serta proses tata kelola dilaksanakan dengan dasar-dasar manajemen terdokumentasi.

3. Terstandar-disasi

- Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi semua kebutuhan di Instansi Pemerintah serta proses tata kelola dilaksanakan sepenuhnya dengan standarisasi.

4. Terintegrasi dan Terukur

- Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi kebutuhan hubungan antar Instansi Pemerintah serta proses tata kelola dilaksanakan dengan pengukuran kinerja secara kuantitatif.

5. Optimum

- Pengaturan telah ditetapkan dan dievaluasi terhadap perubahan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal serta proses tata kelola dilaksanakan dengan peningkatan kualitas.

Tingkat Kematangan Pada Kapabilitas Fungsi Teknis

1. Informasi

- Layanan SPBE dalam bentuk informasi satu arah.

2. Interaksi

- Layanan SPBE dalam bentuk informasi dua arah.

3. Transaksi

- Layanan SPBE dalam bentuk pertukaran informasi dan layanan.

4. Kolaborasi

- Layanan SPBE terintegrasi dengan layanan SPBE lain.

5. Optimalisasi

- Layanan SPBE dapat beradaptasi terhadap perubahan lingkungan internal dan eksternal.

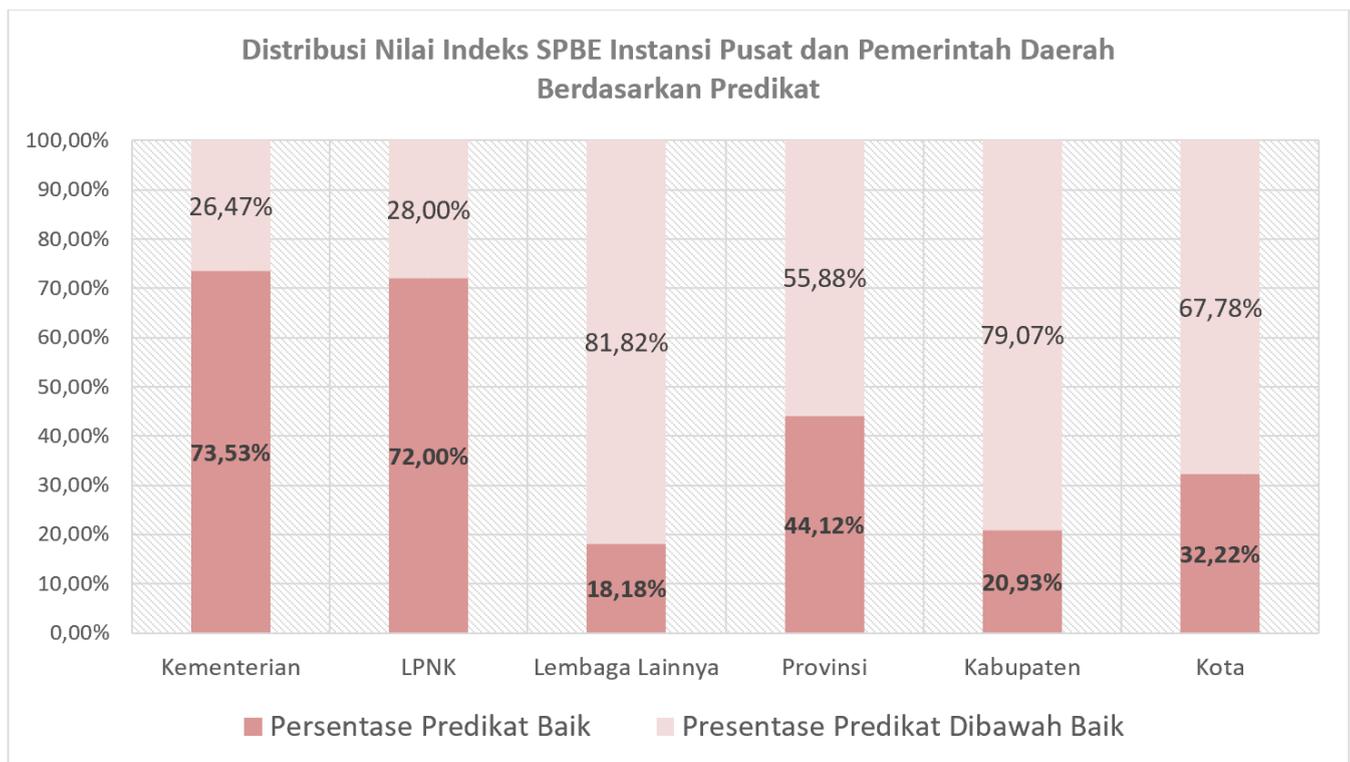
EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2021

Domain dan Aspek Penilaian	Bobot
Domain 1 - Kebijakan SPBE	13%
Aspek 1 - Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	13%
Domain 2 - Tata Kelola SPBE	25%
Aspek 2 - Perencanaan Strategis	10%
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	10%
Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE	5%
Domain 3 - Manajemen SPBE	16,5%
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE	12%
Aspek 6 - Audit TIK	4,5%
Domain 4 - Layanan SPBE	45,5%
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	27,5%
Aspek 8 - Layanan Publik Berbasis Elektronik	18%

Predikat Indeks SPBE		
NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT
1	4,2 - 5,0	Memuaskan
2	3,5 - < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 - < 3,5	Baik *)
4	1,8 - < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

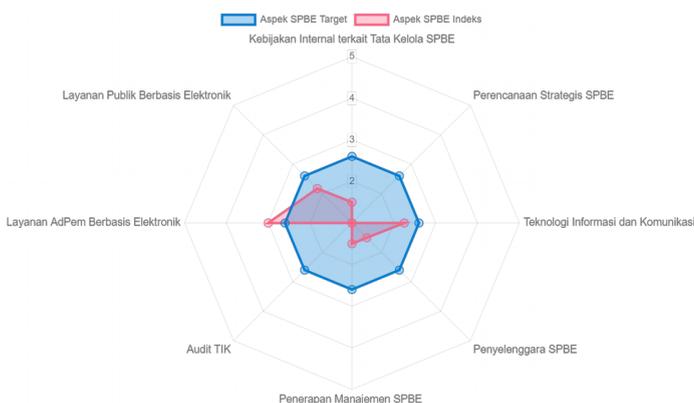
*) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)

Indeks	Rata-rata nilai						
	Nasional	Kementerian	LPNK	Lembaga Lain	Provinsi	Kabupaten	Kota
SPBE	2,24	2,84	2,77	2,10	2,46	2,11	2,29
Domain Kebijakan	2,21	2,68	2,81	1,89	2,26	2,13	2,23
Kebijakan Internal Terkait Tata Kelola	2,21	2,68	2,81	1,89	2,26	2,13	2,23
Domain Tata Kelola	1,89	2,61	2,56	1,83	2,14	1,73	1,91
Perencanaan Strategis	1,77	2,36	2,47	1,80	1,91	1,62	1,78
Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,00	2,86	2,71	1,86	2,36	1,82	1,99
Penyelenggaraan SPBE	1,93	2,59	2,46	1,82	2,16	1,78	2,02
Domain Manajemen	1,23	1,50	1,39	1,25	1,31	1,17	1,26
Penerapan Manajemen SPBE	1,26	1,53	1,37	1,25	1,35	1,20	1,29
Audit TIK	1,17	1,43	1,44	1,23	1,22	1,11	1,17
Domain Layanan SPBE	2,81	3,49	3,37	2,62	3,10	2,66	2,88
Administrasi Pemerintahan	2,86	3,50	3,48	2,86	3,14	2,71	2,88
Layanan Publik	2,74	3,49	3,21	2,26	3,04	2,59	2,88



Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek

	Nama Indeks	Nilai
	SPBE	2,04
	Domain Kebijakan SPBE	1,50
	Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	1,50
	Domain Tata Kelola SPBE	1,60
	Perencanaan Strategis SPBE	1,00
	Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,25
	Penyelenggara SPBE	1,50
	Domain Manajemen SPBE	1,36
	Penerapan Manajemen SPBE	1,50
	Audit TIK	1,00
	Domain Layanan SPBE	2,67
	Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,00
	Layanan Publik Berbasis Elektronik	2,17



Kekuatan dan Kelemahan

A. Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat adalah dengan adanya Kebijakan Internal Manajemen Data, Kebijakan Internal Layanan Pusat Data, Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi, dan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE.

- **Kekuatan**
Pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola ini belum terdapat kebijakan yang menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
- **Kelemahan**
Namun di sisi lain, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat masih belum memiliki kebijakan internal yang mengatur terkait Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, Pembangunan Aplikasi SPBE, Layanan Jaringan Intra, Penggunaan Sistem Penghubung Layanan, dan Audit TIK, di mana data dukung yang diberikan belum sesuai sebagai data dukung pada indikator terkait (belum berupa dokumen kebijakan). Sedangkan untuk kebijakan internal yang mengatur terkait Manajemen Data, Layanan Pusat Data, dan Manajemen Keamanan Informasi, di mana kebijakan belum mengatur secara lengkap mengenai cakupan yang harus dipenuhi dari indikator terkait atau kebijakan baru mengatur penggunaan pada sebagian unit kerja/perangkat daerah.

B. Perencanaan Strategis SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Perencanaan Strategis SPBE belum dipenuhi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

- **Kekuatan**
Pada Aspek Perencanaan Strategis SPBE ini belum terdapat perencanaan yang menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

- Kelemahan
Namun di sisi lain, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat masih belum memiliki perencanaan strategis terkait Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, Rencana dan Anggaran SPBE, dan Inovasi Proses Bisnis SPBE, di mana tidak adanya perencanaan strategis pada data dukung yang disampaikan.

C. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat adalah dengan adanya Pembangunan Aplikasi SPBE, Layanan Pusat Data, Layanan Jaringan Intra, dan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan.

- Kekuatan
Pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi ini belum terdapat TIK yang menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
- Kelemahan
Namun di sisi lain, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sudah memiliki TIK terkait Pembangunan Aplikasi SPBE, Layanan Pusat Data, dan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan, di mana meskipun sudah tersedia akan tetapi belum dikonsultasikan kepada unit kerja/perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan TIK atau belum terdapat prosedur pengoperasian baku atau belum diterapkan di seluruh unit kerja/perangkat daerah.

D. Penyelenggara SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Penyelenggara SPBE yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat adalah dengan adanya Tim Koordinasi SPBE.

- Kekuatan
Pada Aspek Penyelenggara SPBE ini belum terdapat tata kelola yang menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
- Kelemahan
Namun di sisi lain, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat masih belum memiliki tata kelola terkait Kolaborasi Penerapan SPBE, di mana kolaborasi antar unit kerja/perangkat daerah dalam penerapan SPBE dilaksanakan sewaktu-waktu dan tanpa perencanaan. Sedangkan pada tata kelola terkait Tim Koordinasi SPBE, tim koordinasi telah terbentuk akan tetapi tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE belum dilaksanakan seluruhnya.

E. Penerapan Manajemen SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Penerapan Manajemen SPBE yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat adalah dengan adanya Penerapan Manajemen Keamanan Informasi, Penerapan Manajemen Data, dan Penerapan Manajemen Layanan SPBE.

- Kekuatan
Pada Aspek Penerapan Manajemen SPBE ini belum terlihat adanya kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
- Kelemahan
Namun di sisi lain, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat masih belum memiliki penerapan manajemen SPBE terkait Risiko SPBE, Aset TIK, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pengetahuan, dan Perubahan, di mana penerapan manajemen belum diterapkan atau diterapkan tanpa program kegiatan yang terarah dan terencana. Sedangkan pada penerapan manajemen SPBE terkait Keamanan Informasi dan Manajemen Data, sudah diterapkan akan tetapi baru dilaksanakan pada sebagian unit kerja atau belum mengacu pada pedoman yang telah ditetapkan.

F. Audit TIK

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Audit TIK belum dipenuhi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

- Kekuatan
Pada Aspek Audit TIK ini belum terdapat pelaksanaan audit yang menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
- Kelemahan
Namun di sisi lain, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat meskipun sudah memiliki penerapan pelaksanaan audit terkait Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE, akan tetapi

dilaksanakan tanpa perencanaan yang berkesinambungan.

G. Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat adalah dengan adanya Layanan Perencanaan, Layanan Penganggaran, Layanan Keuangan, Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, Layanan Kepegawaian, Layanan Kearsipan Dinamis, Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah, Layanan Pengawasan Internal Pemerintah, Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi, dan Layanan Kinerja Pegawai.

- Kekuatan

Pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik ini dapat terlihat adanya Layanan Perencanaan, Layanan Penganggaran, dan Layanan Keuangan menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Pada ketiga indikator tersebut dibuktikan dengan adanya layanan kolaborasi yaitu integrasi multistakeholder.

- Kelemahan

Namun di sisi lain, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat meskipun sudah memiliki Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik terkait Kepegawaian, Pengawasan Internal Pemerintah, dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi, akan tetapi baru memperlihatkan sampai dengan layanan interaksi.

H. Layanan Publik Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat adalah dengan adanya Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik, Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Layanan Publik Sektor 1, 2, dan 3.

- Kekuatan

Pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik ini dapat terlihat adanya Layanan Publik Sektor 1 menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Layanan Publik Sektor 1 dibuktikan dengan adanya layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain.

- Kelemahan

Namun di sisi lain, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat meskipun sudah memiliki Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik, Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik, Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Layanan Publik Sektor 2

Rekomendasi

Secara prinsip, dengan adanya implementasi kebijakan internal, tata kelola, manajemen dan layanan SPBE akan mendorong peningkatan penerapan SPBE pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Adapun dari hasil evaluasi SPBE yang telah dilakukan terhadap Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, belum dapat menggambarkan predikat baik dalam penerapan SPBE, sebagaimana terdapat beberapa keunggulan dan kelemahan.

Keunggulan penerapan SPBE yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat adalah pada penerapan Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik. Keunggulan ini terlihat dari dengan adanya Layanan Perencanaan, Layanan Penganggaran, dan Layanan Keuangan yang sudah mencapai tingkat layanan kolaborasi yaitu integrasi multistakeholder. Sedangkan pada Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, Layanan Kearsipan Dinamis, Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah, dan Layanan Kinerja Pegawai sampai pada tingkat layanan transaksi. Indikator selebihnya pada aspek tersebut baru sampai pada tingkat layanan interaksi. Meskipun demikian, tidak ada indikator yang baru mencapai tingkat layanan informasi. Perlu adanya peningkatan pencapaian tingkat layanan pada masing-masing indikator hingga mencapai layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain ataupun integrasi multistakeholder, dilakukan reviu dan evaluasi, serta dilakukan perbaikan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi tersebut.

Namun di sisi lain, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat masih terdapat beberapa kelemahan, khususnya pada aspek Perencanaan Strategis SPBE dan Audit TIK. Perencanaan Strategis SPBE belum tersedia kecuali pada Rencana dan Anggaran SPBE, akan tetapi belum dikonsultasikan dengan unit pengelola TIK. Pada aspek Audit TIK telah dilaksanakan tanpa perencanaan yang berkesinambungan.

Aspek yang perlu mendapat perhatian serius Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat adalah aspek Perencanaan Strategis SPBE dan Audit TIK dikarenakan masih memiliki tingkat kematangan 1 (satu). Adapun aspek-aspek yang lain juga perlu mendapat perhatian. Hal ini dikarenakan aspek yang memiliki tingkat kematangan tertinggi pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, yaitu 3 (tiga), hanya aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik. Aspek yang memiliki tingkat kematangan di atas 2 (dua) adalah aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Layanan Publik Berbasis Elektronik. Selebihnya memiliki tingkat kematangan di bawah 2. Diharapkan ke depannya keseluruhan aspek mendapat perhatian serius, sehingga pada pelaksanaan evaluasi SPBE selanjutnya kesemua aspek tersebut sudah dapat memenuhi indikator dan kriteria penilaian sesuai target.

Perolehan Nilai Tingkat Kematangan Indikator

Target nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator adalah 3 (tiga)

No	Indikator	Nilai Tingkat Kematangan
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	1
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	1
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	2
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	1
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	2
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah	1
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi	1
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	2
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	1
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	3
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1
13	Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE	1
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	1
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	2
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	2
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah	2
19	Tingkat Kematangan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	1
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	1
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	2
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	2
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	1
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	1
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	1
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	1
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	3
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	1
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	1
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	1
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	4
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	4
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	4
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	3
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	2
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	3
38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah	3
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	2
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	2
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	3
42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	2
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	1
44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	2
45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	4
46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	2
47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	2